

Judul : DPR Perketat Pengawasan SAL dan Disiplin Fiskal
Tanggal : Kamis, 03 September 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 9

DPR Perketat Pengawasan SAL dan Disiplin Fiskal

Penggunaan SAL pada tahun berjalan harus memperoleh persetujuan DPR sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Koordinasi dengan instansi terkait pun akan diperkuat.

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat akan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan APBN 2027 dengan mewajibkan pemerintah mengevaluasi perkembangan asumsi makro setiap tiga bulan serta melaporkan pengelolaan saldo anggaran lebih atau SAL dan profil utang secara berkala.

Langkah itu ditempuh untuk memastikan pengendalian defisit, tidak hanya bertumpu pada utang dan pembiayaan, tetapi juga ditopang penguatan kondisi fiskal. Komisi XI DPR meminta pemerintah memperkuat pendapatan negara dan kualitas belanja agar ruang fiskal tetap terjaga dan pembiayaan bisa diarahkan ke kegiatan produktif.

Kesepakatan mengenai asumsi dasar ekonomi makro, sasaran pembangunan, dan indikator pembangunan RAPBN 2027 tersebut dicapai dalam rapat kerja Komisi XI DPR bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan, kesepakatan asumsi makro itu akan diikuti mekanisme pemantauan secara berkala. Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Badan Pengelola Investasi Danantara akan diminta menyampaikan laporan perkembangan dan evaluasi setiap tiga bulan selama 2027.

"Laporan perkembangan dan evaluasi asumsi makro dalam pelaksanaan APBN setiap tiga bulan pada tahun 2027," kata Misbakhun.

Adapun laporan tersebut mencakup perkembangan per-

tumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan tingkat bunga SBN. Pemerintah juga harus melaporkan dampaknya terhadap pendapatan dan belanja negara, keseimbangan primer, defisit anggaran, pembiayaan, serta posisi utang pemerintah.

Komisi XI selanjutnya akan memberikan rekomendasi ke Kemenkeu untuk melakukan mitigasi risiko fiskal dan menyesuaikan kebijakan APBN apabila diperlukan. Mekanisme itu bertujuan menjaga kesinambungan fiskal sekaligus memastikan APBN tetap berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi dan pendorong pembangunan.

Komisi XI juga meminta pemerintah memperketat pengelolaan pembiayaan. Pemerintah diminta memastikan defisit dan utang tetap berada dalam batas aman dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, pengelolaan risiko, transparansi, dan akuntabilitas.

Menurut Misbakhun, kebijakan defisit dan pembiayaan harus berjalan beriringan dengan penguatan kondisi keuangan negara. Pemerintah perlu meningkatkan pendapatan negara dan memperbaiki kualitas belanja sehingga pengendalian defisit tidak semata-mata dilakukan lewat tambahan utang atau sumber pembiayaan lain.

Pemerintah juga diminta memastikan pembiayaan, terutama utang, digunakan untuk kegiatan produktif yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaannya tetap harus memperhitungkan biaya, risiko,

dan kemampuan keuangan negara dalam jangka panjang.

SAL diawasi

Pengawasan DPR juga diarahkan pada pemanfaatan SAL oleh pemerintah. Misbakhun mengatakan, penggunaan SAL pada tahun berjalan harus memperoleh persetujuan sesuai peraturan perundang undangan. SAL juga perlu dikelola secara hati-hati dan optimal sebagai penyangga fiskal dalam menghadapi ketidakpastian.

"Penggunaan saldo anggaran lebih yang kita kenal dengan SAL pada tahun anggaran berjalan harus mendapatkan persetujuan seperti DPR, sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku" ujarnya.

Pemerintah selanjutnya wajib menyampaikan laporan profil utang kepada Komisi XI secara berkala. Laporan tersebut mencakup posisi, struktur, dan indikator risiko utang termasuk kepemilikan SBN domestik yang diperdagangkan.

Komisi XI juga meminta pemerintah memperkuat pasar keuangan domestik, memperluas basis investor, dan mendiversifikasi sumber pembiayaan untuk mengurangi dampak gejolak eksternal. Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha serta *blended finance* mendorong untuk mendukung pembiayaan investasi.

Dalam pembiayaan investasi, pemerintah diminta mengoptimalkan peran Danantara, BUMN, dan *special mission vehicle* (SMV) Kemenkeu untuk mendukung agenda prioritas nasional serta pengelolaan aset negara. Pemerintah juga diminta mengarahkan pembiayaan nonutang di sektor perumahan

untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai penempatan SAL di perbankan tidak akan mengganggu likuiditas. Sebaliknya, kebijakan tersebut dinilai dapat menciptakan ruang bagi pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dan mendukung ekspansi sektor swasta.

"Itu (SAL) kalau ditahan terus ke depan, cukup menciptakan pertumbuhan kredit di atas 20 persen. Data terakhir, kan, kredit 13,8 persen, meningkat dibandingkan sebelumnya karena pengaruh likuiditas di sistem keuangan kita," ujarnya.

Purbaya sebelumnya memperpanjang penempatan dana SAL di perbankan hingga Juli 2027. Menurut dia, penempatan dana pemerintah dalam waktu lebih panjang memberi peluang lebih besar untuk menciptakan kondisi likuiditas yang mendukung intermediasi perbankan.

Dalam membaca kondisi likuiditas, Purbaya mengatakan lebih menggunakan perkembangan *base money* (M0) dibandingkan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga. Pada Juli 2026, *base money* tumbuh 18,3 persen dan pada Agustus diperkirakan masih berada di kisaran 18 persen.

Tingkatkan koordinasi

Menurut Purbaya, pemerintah akan meningkatkan koordinasi dengan Bank Indonesia agar penempatan SAL memberikan dampak optimal terhadap perekonomian.

"Dengan koordinasi yang lebih baik antara keuangan dan bank sentral, ruang bagi kita untuk menciptakan kondisi likuiditas yang bagus untuk per-

bankan terbuka lebar. Sektor swasta itu bisa tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya," ujarnya.

Ia bahkan optimis pertumbuhan ekonomi pada 2027 dapat melampaui target 6 persen apabila pemerintah mampu mendorong aktivitas ekonomi secara konsisten. "Itu kalau pemerintah malas saja bisa tumbuh 6 persen ekonominya. Jadi, akan signifikan di atas 6 persen," kata Purbaya.

Apabila pemerintah sewaktu-waktu dalam kondisi terdesak dan perlu menarik dana tersebut, ungkap Purbaya, langkah itu akan dikoordinasikan dengan Bank Indonesia agar tak mengganggu kondisi likuiditas.

Ia pun memastikan SAL tidak dapat langsung digunakan sebelum melalui prosedur persetujuan DPR. Sebagian dana dapat ditempatkan di BI dan sebagian lainnya di sistem perbankan sesuai kebutuhan pengelolaan arus kas pemerintah.

Kebijakan penempatan SAL sebelumnya memang ditujukan untuk memperkuat likuiditas perbankan dan mendorong penyaluran kredit ke sektor riil. Setelah masih tumbuh di bawah 10 persen hingga April 2026, pertumbuhan kredit meningkat menjadi 11,51 persen pada Mei dan 13,58 persen pada Juli.

Namun, percepatan kredit berlangsung di tengah tekanan terhadap nilai tukar dan likuiditas. Ketika rupiah sempat tertekan hingga sekitar Rp 18.000 per dolar AS, BI memperketat kebijakan moneter. Kondisi itu turut meningkatkan biaya dana perbankan dan dapat memengaruhi kemampuan intermediasi bank. (DIM)